**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Pasca Deklarasi Bali tentang *Forest Law Enforcement Governance* pada tahun 2001 , banyak negara mulai melakukan proses sertifikasi dan regulasi yang secara langsung mampu melindungi negara negara eksportir maupun importir produk hasil hutan dari kejahatan-kejahatan serta kerusakan di kawasan hutan. Kejahatan dan kerusakan di kawasan hutan ini dapat memberikan dampak negatif baik secara materil maupun fisik bagi negara eksportir maupun importir.

Kerusakan materiil dari kejahatan dan kerusakan hutan dapat dilihat dari banyaknya penjualan-penjualan *illegal* dari Hasil Hutan. Produk Hasil Hutan, sendiri terbagi pada dua bagian yaitu produk hasil hutan berupa kayu dan non kayu atau dikenal sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). HHBK pun dibagi menjadi dua yaitu HHBK hewani dan HHBK nabati Produk HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budi daya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Hasil hutan bukan kayu umumnya merupakan hasil sampingan dari pohon, misalnya getah, daun, kulit,buah atau beberapa tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain.[[1]](#footnote-2)

Salah satu organisasi internasional yang secara kontinum menunjukkan keseriusannya dalam mengaplikasikan *Forest Law Enforcemet Governamce* adalah Uni Eropa.  Hal itu dikarenakan, UE mengembangkan berbagai legislasi, program aksi dan direktif dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk berbagai isu terkait keprihatinan masyarakat UE seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, *consumer's choice*, dan *animal welfare*. Dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup global, UE menunjukkan keinginan untuk ikut memecahkan isu-isu pelik termasuk masalah perubahan iklim.[[2]](#footnote-3)

FLEGT atau *Forest Law Enforcement Government and Trade* yang biasa juga dikenal sebagai Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan merupakan salah satu regulasi yang diangkat oleh UE dalam menghambat dan mencegah kejahatan serta kerusakan di kawasan hutan. Regulasi ini secara khusus merupakan respon UE terhadap Deklarasi Bali di tahun 2001, sekaligus mengenai permasalahan penebangan liar dan *illegal logging*. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.[[3]](#footnote-4) Konsekuensi dari illegal logging adalah tidak terpenuhinya kriteria pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*), yang jika dibiarkan akan berdampak pada kerusakan lingkungan di dalam ekosistem hutan.

Uni Eropa merupakan salah satu konsumen terbesar produk kayu. Produk Kayu yang dikonsumsi oleh UE merupakan kayu kayu yang didapat di wilayah Afrika, Asia dan Amerika Selatan. Jika mereka tanpa sadar membeli kayu ilegal, mereka menciptakan pasar yang menguntungkan bagi pembalak liar dan merusak upaya untuk menegakkan hukum hutan di negara kayu-ekspor. Pembelian produk kayu yang berasal dari *illegal logging* tidak bisa dibiarkan oleh UE, karena tidak sesuai dengan komitmen Uni Eropa terkait isu lingkungan hidup. Hal tersebut melatar belakangi keputusan Uni Eropa dalam membangun FLEGT Action Plan di tahun 2003.

FLEGT Action Plan membawahi dua peraturan, yaitu EU Timber Regulation atau Peraturan Kayu UE dan FLEGT-VPA. Peraturan Kayu UE adalah suatu regulasi yang ditetapkan untuk meminimalkan perdagangan kayu ilegal yang menjadi penyebab utama dari kerusakan hutan dan ekosistem di dalamnya. Aturan ini mencegah kayu illegal masuk ke pasar Uni Eropa. Peraturan ini telah diimplementasikan ditahun 2013. Sedangkan, FLEGT-VPA atau Forest Law Enforcement Government and Trade- Voluntary Partnership Agreement dapat dipahami juga sebagai Kemitraan Sukarela – Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan merupakan perjanjian perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra.[[4]](#footnote-5)

Perkembangan sikap Uni Eropa yang timbul akibat deklarasi Bali ini, tentunya berpengaruh terhadap Negara-Negara yang mengekspor produk hasil hutan kayu dan produk olahan kayu. Perubahannya dapat dilihat melalui kesulitan terhadap akses pasar yang dapat dimasuki oleh Negara-negara pengekspor kayu. Berdasarkan hal tersebut, mau tidak mau Negara yang memiliki komoditi utama berupa produk hasil hutan harus menyesuaikan diri terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa.

Berangkat dari itu beberapa Negara penghasil kayu dan produk olahan kayu terbesar dunia, mulai menggunakan pendekatan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi tersebut, tercermin melalui keikutsertaan dalam kerjasama FLEGT-VPA. Salah satu Negara yang ikut serta dalam skema kerjasama ini adalah Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam kerangka kerjasama tersebut lumrah karena Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut Megadiversity Country. Sekitar 70% atau 133,6 juta ha dari luas daratan Indonesia adalah hutan. Sekitar 37% dari kawasan hutan telah dicadangkan untuk perlindungan atau konservasi, 17% untuk dikonversi ke penggunaan lainnya dan sekitar 46% dari hutan diperuntukkan bagi keperluan produksi.[[5]](#footnote-6) Produk Hasil Hutan memang merupakan komoditi utama Indonesia di bidang perdagangan internasional.

Indonesia merupakan salah satu Negara produsen kayu tropis terbesar di dunia. Negara ini mengekspor berbagai macam produk kayu. Produk kayu yang diproduksi Indonesia mulai dari kayu lapis, pulp dan kertas untuk furnitur dan kerajinan. Tujuan ekspor utama produk kayu Indonesia adalah Cina, Uni Eropa, Jepang dan Korea.[[6]](#footnote-7)

Tahun 2002, produk kayu Indonesia pernah ditolak oleh UE, karena kayu Indonesia belum memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk diekspor ke UE dan itu terjadi selama satu tahun.[[7]](#footnote-8) Oleh karena itu, SVLK dibangun sebagai Perwujudan good forest governance menuju pengelolaan hutan lestari sertapermintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, khususnya dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Keberadaan SVLK juga dibangun sebagai bentuk "National Insentive" untuk mengantisipasi semakin maraknya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing, seperti skema FSC atau *Forest Stewardship Council,*PEFC atau *Programme for the Endorsement of Forest Certification* dan sebagainya.[[8]](#footnote-9)

Indonesia dan UE memulai perundingan VPA pada bulan Januari 2007 tetapi barulah setelah bulan Juli 2009 dialog semakin intensif setelah diselesaikannya sistem jaminan legalitas kayu Indonesia (TLAS). Sejak Maret 2007 sampai April 2011 telah diadakan tiga Pertemuan Pejabat Tinggi (Senior Officials Meeting), tujuh Pertemuan Kelompok Kerja Teknis (Technical Working Group), tujuh Pertemuan Pakar Gabungan (Joint Expert Meeting) dan delapan Konferensi Video untuk menyelesaikan dan menyepakati teks VPA serta lampiran-lampirannya.[[9]](#footnote-10) Setelah melalui proses perundingan yang panjang, kerangka kerjasama ini ditandatangani pada tahun 2013 di Brussel, pada fase berikutnya Indonesia dan Uni Eropa melakukan proses implementasi yang dimulai pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 ekspor kayu legal dari Indonesia telah dimulai dengan menggunakan sistem V-legal. Sekitar 150.000 dokumen V-legal telah didistribusikan ke 173 negara, termasuk Negara Negara bagian dari Uni Eropa. Melalui kesuksesan implementasi V-legal sebagai bentuk penerapan pengelolaan hutan lestari dibawah SVLK, Indonesia dan Uni Eropa kembali melakukan proses negosiasi untuk tercapainya F*LEGT-license.* Ada beberapa proses yang dilalui sebelum diterbitkannya *FLEGT-License,* diantaranya adalah proses adopsi amandemen “*commission delegated regulation*” Uni Eropa di bulan Juni. Selanjutnya, harus ada jangka waktu yang dilewati untuk batas waktu “no objection” oleh parlemen dan council UE. Setelah terlewatinya batas waktu tersebut, maka pada Joint Implementation Comission ke 5 ditetapkan tanggal perilisan *FLEGT-license*[[10]](#footnote-11). Perilisan *FLEGT-license* merupakan pencapaian tertinggi dalam kerjasama FLEGT-VPA, sekaligus prestasi berharga bagi Indonesia, karena merupakan Negara pertama di dunia yang berhasil mencapai pencapaian tersebut di November 2016.

Indonesia sebagai mitra kerjasama sukarela dalam FLEGT, telah melewati proses yang sangat panjang. Keteguhan Indonesia dalam proses negosiasi tentunya tidak terlepas dari kepentingan nasional Indonesia sebagai salah satu Negara produsen kayu dan produk olahan kayu terbesar di dunia. Motif dari interaksi kerjasama internasional adalah kepentingan nasionalnya, sehingga dalam kasus ini Indonesia berusaha mengakses pasar Uni Eropa dalam perdagangan kayu dan produk olahan kayu.

Namun, perlu ditelaah kembali lebih dalam mengenai dinamika ekspor kayu dan produk olahan kayu Indonesia di Uni Eropa melalui pendekatan periodik tahun ke tahun karena tingkat kerjasama yang juga meningkat, seharusnya sejalan dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa Oleh karena hal tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian terkait kerjasama FLEGT-VPA dengan judul, “***Kerja Sama FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa dan Kaitannya dalam Peningkatan Ekspor Produk Hasil Hutan Indonesia ke Uni Eropa***”

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, maka penulis akan menyajikan permasalahan-permasalah untuk dibahas. Permasalahan permasalahan tersebut meliputi:

1. Bagaimana kerjasama FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa?
2. Bagaimana aktivitas ekspor produk kayu Indonesia ke Uni Eropa?
3. Bagaimana peran FLEGT-VPA dalam upaya meningkatkan ekspor produk hasil hutan Indonesia ke Uni Eropa?
4. **Pembatasan Masalah**

Ruang lingkup masalah yang luas akan menimbulkan kerancuan pada proses analisa hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi ruang lingkup komoditi produk hasil hutan berupa kayu dan produk turunan kayu dengan periode pengambilan data dari tahun 2007 sampai 2016.

1. **Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: *Bagaimana kerjasama FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa berperan dalam mendorong peningkatan ekspor produk hasil hutan Indonesia ke Uni Eropa?*

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui kerjasama FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa.
2. untuk mengetahui aktivitas ekspor produk kayu Indonesia ke Uni Eropa.
3. untuk mengetahui peran FLEGT-VPA dalam upaya meningkatkan ekspor produk hasil hutan Indonesia ke Uni Eropa.
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional. Khususnya peminat masalah-masalah Hubungan Internasional dalam bidang Ekonomi Politik Internasional dan Perdagangan Internasional.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan masukan untuk keperluan referensi akademis bagi yang berminat mengadakan penelitian lanjutan untuk masalah kerjasama FLEGT-VPA.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh tugas akhir stratra-1 pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
5. **Kerangka Teoritis**

Dalam menulis karya skripsi ini diperlukan landasan teoritis untuk mempermudah melakukan penelitian, landasan teoritis ini juga dimaksudkan untuk memperkuat analisa. Landasan ini akan disajikan oleh penulis dalam kerangka berpikir yang bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh pendapat-pendapat para pakar ilmu hubungan Internasional dan ilmu lain yang memiliki korelasi dengan objek kajian.

Dalam mengangkat fenomena-fenomena yang ada dan terjadi dalam Hubungan Internasional, penulis akan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana penopang dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian ini.

Berdasarkan atas paparan yang disampaikan, maka penulis meyakini perlunya pengertian yang mendasar terhadap teori-teori dasar dari Hubungan Internasional dalam menyelami arti serta penyelesaian dari permasalahan yang diangkat. Berangkat dari hal tersebut maka team penulis, akan memaparkan pengertian studi hubungan internasional.

Pengertian terkait Studi Hubungan Internasional menurut **Martin Griffith dan Terry O’Gallaghan***,* adalah sebagai berikut:

***The discipline of International Relations (IR) is the academic study of the origins and consequences (both empirical and normative) of a world divided among states[[11]](#footnote-12).***

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa studi Hubungan Internasional merupakan disiplin ilmu yang luas. Sehingga terdapat sub-sub disiplin lainnya di dalam lingkup studi Hubungan Internasional. Lingkup studi hubungan internasional diantaranya meliputi keahlian diplomatis, analisis politik luar negeri, perbandingan politik, sosiologi historis, ekonomi politik internasional dan lain lain[[12]](#footnote-13).

Dalam studi hubungan internasional sendiri terjadi pergeseran isu yang disebabkan oleh perkembangan keadaan internasional yang terus berubah. Perkembangan yang terus terjadi, dari perubahan pelaku aktor hubungan internasional hingga isu isu baru yang menjadi bagian dari ruang lingkup HI. Dulu Hubungan Internasional sangat identik dengan negara sebagai aktor sentralnya dan isu *high politics* sebagai isu yang mendominasinya. Namun, sekarang aktor hubungan internasional tidak lagi hanya negara tetapi aktor non negara pun memiliki peran yang sama penting dalam praktik hubungan internasional. Begitupula dengan isu yang menjadi ruang lingkupnya, sebelum perang dingin usai permasalahan hubungan internasional hanya berputar pada isu keamanan dan militer yang merupakan ranah *high politics* dan sekarang isu *low politics* seperti lingkungan hidup, kesamaan gender, hak asasi manusia menjadi sama dominannya dengan *high politics.*

**Stanley Hoffman** menganggap “perubahan dalam HI meliputi lima bagian utama, yaitu: actor, tujuan para actor, power, hirarki interaksi dan system internasional itu sendiri”.[[13]](#footnote-14)

Hal tersebut juga didukung secara implisit oleh pernyantaan **Robert Jackson dan George Sorensen**, sebagai berikut:

**Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara tetapi juga dengan subyek lain seperti interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, perusahaan transnasional, organisasi internasional, lingkungan hidup ketimpangan gender dan lain lain.[[14]](#footnote-15)**

Perubahan pada aktor diindikasikan dengan perubahan jumlah dan sifat aktor hubungan internasional. Terjadi penambahan secara signifikan aktor- aktor non negara seperti Multi National Corporation (MNC) dan International Organization.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua aktor hubungan internasional dalam proses interaksinya. Dua aktor tersebut adalah aktor negara bangsa dan Organisasi Internasional. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa perlu pengertian yang lebih dalam terkait Organisasi Internasional. Organisasi Internasional sendiri merupakan konsep yang dibawa oleh perspektif Liberalisme[[15]](#footnote-16).

Perspektif Liberalisme sendiri didasari oleh kritik terhadap perspektif realisme yang memiliki asumsi dasar, seperti pandangan pesimis pada manusia dan keyakinan terhadap dasar hubungan internasional yang bersifat konfliktual dan cenderung berakhir pada perang.[[16]](#footnote-17) Liberalisme memiliki pandangan yang sangat berkebalikan dari asumsi dasar perspektif realisme. Kaum liberalisme umumnya mengambil pandangan positif tentang sifat manusia. Meskipun begitu, kaum liberalisme sadar akan sikap individu yang selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap satu hal, tetapi mereka melihat fenomena ini sebagai salah satu hal yang justru akan mendorong individu untuk terlibat dalam aksi social yang kolaboratif dan kooperatif, baik domestik maupun internasional, yang menghasilkan manfaat besar bagi setiap orang baik dalam negeri maupun luar negeri.[[17]](#footnote-18)

Perspektif liberalisme terbagi lagi menjadi beberapa pandangan. Terdapat liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi, liberalisme institusionalisme atau yang juga dikenal dengan neoliberalisme dan liberalisme republikan. Semua pandangan dapat menjelaskan terkait keberadaan organisasi internasional sebagai institusi yang menaungi kerjasama antar negara, namun pandangan yang secara detail lebih menggambarkan pembentukkan organisasi internasional adalah liberalisme interdependensi dan liberalisme institusionalisme. Liberalisme interdependensi memaknai perihal hubungan antar negara yang didasari pada ketergantungan timbal balik dimana rakyat dan pemerintah dapat dipengaruhi oleh kejadian dari bagian bumi lain, yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh rekannya di negara lain. Pada bagian selanjutnya, interdependensi umum ini nantinya akan erat kaitannya dengan proses integrasi kawasan.

Jika liberalisme interdependensi menggarisbawahi peran kerjasama yang didasari oleh ketergantungan timbal balik, maka liberalisme institusionalisme berusaha melengkapi hal tersebut dengan menyiapkan wadah yang lebih terstruktur. Cara yang diambil oleh liberalisme institusionalisme adalah dengan membangun institusi internasional seperti Organisasi Internasional atau transnasional. Bagi kaum liberalisme institusional, keberadaan institusi internasional menolong memajukan kerjasama di antara negara negara.[[18]](#footnote-19) Oleh karena itu, institusi internasional dapat membantu mengurangi rasa ketidakpercayaan antarnegara negara dan rasa takut negara satu sama lain yang dianggap menjadi masalah tradisional yang dikaitkan dengan anarki internasional.

**Graham Evans** dan **Jeffrey Newnham** sendiri mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai “institusi formal yang dibentuk dari adanya perjanjian antar aktor aktor di dalam hubungan internasional”***.***[[19]](#footnote-20)

Keberadaan instrumen perjanjian dalam organisasi internasional yang dinyatakan diatas pun dikemukakan oleh **Robert Keohane**, sebagai berikut:[[20]](#footnote-21)

**Organisasi internasional memuat adanya perjanjian yang sifatnya eksplisit, dinegosiasikan diantara actor actor internasional, dan memiliki perilaku otorisasi yang sifatnya bisa jadi memberikan rekomendasi atau menerapkan larangan dan batasan atas isu isu tertentu.**

**Teuku May Rudy** menambahkan bahwa di dalam organisasi internasional terdapat elemen elemen tertentu, diantaranya:[[21]](#footnote-22)

**(1)Adanya kerjasama lintas batas negara; (2)Adanya tujuan yang disepakati bersama;(3)Adanya struktur organisasi yang jelas, dan;(4) Adanya pelaksanaan fungsi yang berkesinambungan**

Organisasi Internasional pada dasarnya memiliki tiga fungsi, yaitu sentralistik, independen dan perwakilan dan enforcer (penegak undang undang). Organisasi Internasional sendiri bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, diantaranya adalah:[[22]](#footnote-23)

1. **Organisasi Internasional Publik, yaitu Organisasi internasional yang anggotannya merupakan negara negara yang biasa dikenal sebagai International Governmental Organization; (2)Organisasi Internasional Privat, yaitu Organisasi internasional yang anggotanya berasal dari luar aktor negara yang biasa disebut *International Non Governmental Organization***

Uni Eropa sendiri merupakan organisasi internasional publik yang menggunakan desain institusi. Sehingga proses regionalisme terjadi karena peran institusi regional. Institusi menaungi koordinasi politik luar negeri negara negara anggota.[[23]](#footnote-24)

Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku aktor negara dan non negara di dalam arena transaksi internasional. Perilakunya bisa berwujud kerjasama, pembentukkan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.[[24]](#footnote-25)

Pada penelitian ini perilaku yang hendak dianalisa merupakan perilaku dengan wujud kerjasama, oleh karena itu diperlukan pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku kerjasama dalam hubungan internasional. Kerjasama internasional sendiri merupakan “sisi lain dari konflik internasional yang merupakan aspek dalam hubungan internasional”.[[25]](#footnote-26) Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.[[26]](#footnote-27) Jadi salah satu instrumen yang tidak bisa terlepas dalam kerjasama internasional adalah kepentingan nasional yang dibawa oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama tersebut.

Menurut **Didi Krisna**, Kepentingan Nasional dapat dimaknai, sebagai berikut:[[27]](#footnote-28)

**Kepentingan nasional merupakan kebutuhan dan keinginan-keinginan yang dirasakan oleh suatu negara yang berdaulat dalam hubungan dengan negara lainnya yang merupakan bagian dari lingkungan internasional.**

**Muhadi Sugiono**, memaparkan lebih lanjut terkait kerjasama internasional dimana ada beberapa factor yang harus diperhatikan dalam kerjasama internasional, yaitu:[[28]](#footnote-29)

1. **Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam Politik Internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor ekonomi dan masyarakat sipil; dan; (2) Kerjasama Internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing masing Negara didalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari Negara Negara anggotanya tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan keinginannya sendiri.**

Kerjasama internasional meliputi berbagai bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi. Kerjasama internasional dibidang ekonomi memiliki beberapa bentuk, diantaranya adalah penanaman modal asing, bantuan kredit luar negeri dan perdagangan (ekspor-impor).[[29]](#footnote-30)

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melancarkan proses kerjasama internasional, salah satunya adalah dengan penggunaan diplomasi. Penelitian ini berusaha membahas terkait kerjasama FLEGT-VPA yang memiliki implikasi terhadap aturan perdagangan kayu dan produk olahan kayu, sehingga pendekatan yang digunakan adalah diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi merupakan “ suatu proses dimana negara berhubungan dengan dunia luar dalam upaya memaksimalkan tujuannya di segala bentuk aktivitas, seperti perdagangan, investasi, dan bentuk lainnya dari interaksi ekonomi”.[[30]](#footnote-31) Dimensi diplomasi ekonomi sendiri dapat berupa bilateral, regional, maupun multilateral yang terdiri dari agen resmi ,yaitu kementerian luar negeri dan perdagangan, layanan diplomatik dan komersial, serta aktor non-negara lainnya sehingga membuat partnership ekonomi bersifat dinamis.[[31]](#footnote-32)

Diplomasi ekonomi paling tidak menghadapi tiga isu penting, yaitu; hubungan antara ekonomi dan politik; hubungan antara lingkungan dengan aneka tekanan domestik dan internasional; serta hubungan antara aktor negara dan non-negara (aktor privat/swasta)[[32]](#footnote-33). Kombinasi ketiga hubungan itulah yang akhirnya menjadi salah satu warna utama dinamika hubungan internasional kontemporer.

Kerjasama FLEGT-VPA sendiri menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diartikan sebagai berikut:

**Perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra.[[33]](#footnote-34)**

Kerjasama FLEGT-VPA ini erat kaitannya dengan konsep *green politics*, karena Kerjasama ini dibangun untuk menanggulangi salah satu permasalahan lingkungan yaitu *illegal logging*. Akibat sifat kerjasama yang sangat terkait dengan konsep tersebut. Penulis merasa wajib, untuk memaparkan secara mendasar terkait konsep dari *green politics*. *Green politics* sendiri didasari pada konsep, bahwa:[[34]](#footnote-35)

***Green Politics focus on both the material/metabolic dimensions of human-nonhuman relations as well as the ethical and political status of the nonhuman world – can offer a rather narrow understanding of green politics***

Sehingga, pada hakikatnya *Green Poltics*, memiliki pandangan bahwa manusia bukanlah pusat dari dunia. *Green Politics* meyakini bahwa aspek non-manusia di bumi itu memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Inilah yang pada akhirnya melatarbelakangi, mengapa Green Politics sangat erat kaitannya dengan konsep *econsentrism. Ecosentrism* sendiri merupakan bentuk kritik dari pola kehidupan yang seakan berfokus pada manusia atau *human-centered.*

Selain Green Politics, konsep yang tidak terlepas dari Kerjasama FLEGT-VPA adalah Konsep Global Forest Governance. Konsep tersebut memang tidak juga terlepas dari ideology Green Politics. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa *Global Forest Governance* merupakan bentuk aksi dari Green Politics.

Hutan sendiri menerima peningkatan perhatian dari para pembuat kebijakan dan akademisi. PBB menyatakan 2011 Tahun Hutan Internasional dan Uni Eropa saat ini sedang mempersiapkan sebuah tinjauan ekstensif dari kebijakan hutan dan strategi.[[35]](#footnote-36) Akibatnya, tata kelola hutan global menjadi topik hangat.

Perjanjian ini sangat erat kaitannya dengan pengelolaan hutan lestari. Khusus di Indonesia sendiri, kerjasama ini bersentuhan dengan Pengelolaan Hutan Produk Lestari atau PHPL. PHPL ini sendiri pun memiliki definisi, sebagai berikut:[[36]](#footnote-37)

**Jaminan bahwa kayu yang beredar adalah legal melalui pengelolaan hutan. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.**

Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari sendiri, memiliki tiga tipe prinsip, yang diantaranya adalah sebagai berikut:[[37]](#footnote-38)

1. Kelestarian hasil hutan Tipe kelestarian ini hanya menitikberatkan pada hasil kayu tahunan atau periodik yang sama. Untuk mewujudkan tipe kelestarian ini muncul berbagai konsep sistem silvikultur, penentuan rotasi, teknik penebangan yang tepat dan sebagainya

2. Kelestarian potensi hasil hutan Kelestarian potensi hasil hutan berorientasi pada hutan sebagai pabrik kayu. Pengelola hutan memperoleh kesempatan untuk memaksimumkan produktivitas kawasan hutan dengan cara tidak hanya menghasilkan produk konvensional sehingga diperoleh keuntungan uang yang sebesar-besarnya.

3. Kelestarian sumber daya hutan Kelestarian sumber daya hutan menitikberatkan kepada hutan sebagai ekosistem yang menghasilkan kayu maupun non-kayu, pelindung tata air dan kesuburan tanah, penjaga kelestarian lingkungan, serta berfungsi sebagai gudang untuk kelangsungan hidup berbagai macam sumber genetik, baik flora maupun fauna.

Kerjasama ini tidak bisa berjalan tanpa *Timber Legal Assurance System* (TLAS) yang di Indonesia di adopsi melalui nama Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang disahkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifiikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Pengertian Sistem Verifikasi Legalitas Kayu sendiri, adalah sebagai berikut:[[38]](#footnote-39)

**suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, dan sertifikasi LK.**

Di dalam penelitian ini obyek analisa berkaitan erat dengan kerjasama internasional bentuk ketiga, yaitu kerjasama internasional dalam bentuk perdagangan(ekspor-impor). Oleh karena itu pada kerangka teoritis ini penulis akan mengkhususkan pembahasan mengenai bentuk kerjasama ekonomi internasional perdagangan. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang sering dilakukan oleh pelaku hubungan internasional. Selain itu, perdagangan merupakan aktivitas paling penting dalam ekonomi internasional. Hal itupun sejalan dengan argumen **Robert Giplin** dalam bukunya yang berjudul *The Political Economi of International Relations,* beliau mengatakan bahwa perdagangan (dan perang) selalu menjadi pusat evolusi hubungan internasional dan telah menyebabkan perubahan perubahan mendasar dalam hubungan internasional.[[39]](#footnote-40)

Kembali kepada bentuk dari kerjasama ekonomi internasional yang merupakan perdagangan, diperlukan penjelasan yang lebih gamblang terkait perdagangan internasional. Perdagangan internasioanl berangkat dari konsep perdagangan, sehingga terlebih dahulu diperlukan pemahaman mengenai perdagangan. Boediono memaparkan secara mendasar terkait definisi dari perdagangan. Perdagangan diartikan sebagai “proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing masing pihak”.[[40]](#footnote-41)

Jadi, masing masing pihak harus mempunyai kebebsan untuk menentukan untung rugi pertukaran tersebut dari sudut pandang kepentingan masing masing, dan kemudian menentukkan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak.[[41]](#footnote-42) Boediono juga menjelaskan bahwa aspek kehendak sukarela penting, sebab perdagangan dalam arti khusus tersebut mempunyai implikasi yang sangat fundamental, yaitu bahwa perdagangan hanya akan terjadi apabila paling tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan.[[42]](#footnote-43)Perdagangan sendiri timbul karena salah satu atau kedua pihak melihat adanya manfaat yang bisa diperoleh dari pertukaran tersebut (perdagangan). Sehingga motifnya adalah untuk mendapatkan manfaat tambahan dari perdagangan.

Perdagangan pada masa saat ini sudah tidak dalam lingkup dalam negeri saja, tetapi juga dalam lingkup Negara ke Negara atau yang dikenal dengan perdagangan internasional. Pengertian terkait perdagangan internasional sendiri adalah “kegiatan memperdagangkan output barang atau jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain di dunia”.[[43]](#footnote-44)

Ada banyak teori yang membahas terkait perdagangan internasional. Menurut Tulus T.H Tambunan, pada awalnya teori terkait perdagangan internasional terbagi menjadi dua kategori, yaitu teori teori klasik dan teori teori modern. Namun, pada tahun 1970-an dan 1980an muncul teori teori baru yang kemudian digolongkan sebagai teori alternatif.[[44]](#footnote-45) Sehingga terdapat tiga penggolongan teori perdagangan internasional, yaitu teori klasik, teori modern dan teori alternatif.

Berbeda dengan Tulus T.H Tambunan yang menggolongkan teori teori perdagangan internasional yang secara implisit tergambar melalui waktu lahirnya teori teori tersebut, **Umar Suryadi Bakri** menggolongkan teori teori perdagangan internasional berdasarkan jenisnya, yaitu: teori perdagangan liberal, teori perdagangan merkanitilisme dan teori kebijakan proteksionisme baru[[45]](#footnote-46)

Terlepas dari banyaknya teori yang membahas terkait perdagangan internasional. Teori murni perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan absolute dan keunggulan komparatif merupakan teori yang paling sederhana dalam membahas mengapa suatu Negara dapat melakukan perdagangan internasional, walaupun terdapat berbagai macam kekurangan dari teori murni ini, terlebih teori perdagangan murni internasioanal ini didasarkan kepada beberapa asumsi, seperti biaya produksi tetap dan tidak berubah, nilai atas dasar biaya tenaga kerja yang sifatnya homogen, tidak dihitungnya biaya transportasi. Meskipun demikian, teori perdagangan murni dianggap paling pas dalam membahas perdagangan internasional terlebih di dalam studi Hubungan Internasional. Oleh karena itu, maka akan dijabarkan lebih lanjut terkait teori murni perdagangan internasional, diantara lain:

1. Teori keunggulan absolute Adam Smith

Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa suatu Negara akan melakukan spesialisasi dan ekspor suatu atau beberapa jenis barang tertentu, dimana Negara tersebut memiliki keunggulan absolute dan tidak memproduksi suatu atau beberapa barang tertentu dimana Negara tersebut tidak mempunyai keunggulan absolute atas Negara lain yang memproduksi jenis barang yang sama, suatu Negara akan mengekspor barang X jika Negara itu dapat memproduksinya lebih efisien atau murah dibanding Negara lain dan suatu Negara akan mengimpor barang X jika Negara tersebut tidak dapat memproduksinya secara lebih efisien. Teori ini berinti pada keuntungan mutlak dari aktivitas perdagangan, dan keuntungan mutlak tersebut terjadi karena adanya perbedaan yang sifatnya juga mutlak, yakni perbedaan biaya produksi antarnegara untuk jenis barang yang sama.[[46]](#footnote-47)

1. Teori Keunggulan Komparatif David Ricardo dan John Mill

Teori Keunggulan Absolute menimbulkan satu pertanyaan mendasar terkait perjanjian internasional, yaitu: Jika dari Negara A dan Negara B, Negara A memiliki kemampuan untuk menekan harga produksi barang barang sehingga barang yang dihasilkan lebih murah dari seluruh barang milik Negara B. Apakah perjanjian internasional masih dapat terjadi? Jika, mengutip teori Adam Smith, maka jawabannya adalah tidak. Berdasarkan hal tersebut Ricardo dan Mill melemparkan kritik akan hal yang mendasari pertanyaan tersebut, mereka juga sekaligus berusaha menyempurnakan teori keunggulan absolute. Dasar pemikiran Ricardo dan Mill tidak berbeda dengan dasar pemikiran Adam Smith. Perbedaannya hanya terletak pada cara pengukuran keunggulan suatu Negara, yakni dilihat dari komparatif biayanya. Menurut J.S Mill suatu Negara akan mengkhususkan diripada ekspor barang terntentu bila Negara itu memiliki keunggulan komprartaif terbesar dan akan impor barang tertentu bila Negara tersebut memiliki keunggulan komparatif terbesar dan akan impor barang tertentu bila Negara tersebut memiliki kerugian komparatif atau keunggulan komparatif rendah. David Ricardo juga menambahkan bahwa perdagangan antara dua Negara akan terjadi bila masing masing negra memiliki biaya relative yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda, sehingga menurutnya perbedaan efisiensi atau produktivitas relative antarnegara dalam memproduksi dua atau lebih jenis barang dapat menjadi dasar terjadinya perdagangan internasional. Jadi perbedaan biaya komparatif cukup sebagai alas an untuk terjadinya perdagangan antarnegara.[[47]](#footnote-48)

Teori teori diatas berusaha untuk menjelaskan terkait bagaimana bisa terjadi perdagangan internasional. Aktivitas dasar perdagangan Internasional sendiri meliputi dua hal, yaitu: Impor dan Ekspor. Hal yang berusaha dibahas pada penelitian ini adalah terkait aktivitas ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa. Aktivitas Ekspor Kayu Indonesia sendiri pada tahun 2013 yaitu tahun dimana ditanda tanganinya perjanjian ini dan tahun 2014 telah meningkat sebesar kurang lebih 60 juta USD. Dari obyek penelitian yang berfokus pada peningkatan ekspor produk hasil hutan Indonesia ke Uni Eropa. Maka, diperlukan pengertian lebih lanjut terkait dua hal tersebut.

Pengertian Ekspor sendiri adalah sebagai “kegiatan mengeluarkan/menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri.”[[48]](#footnote-49)Sedangkan, Pengertian Impor sendiri adalah sebagai berikut “kegiatan memasukkan/membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri”[[49]](#footnote-50)

Pada penelitian ini, penulis juga akan menggunakan pendekatan Daya Saing Ekspor yang erat kaitannya dengan teori perdagangan Internasional Baru. Penggunaan teori ini dikarenakan pada kenyataannya perdagangan internasional yang terjadi saat ini sudah tidak sama lagi dengan asumsi asumsi teori perdagangan klasik. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan Teori Keunggulan Kompetitif.

Adapun pengertian dari Teori Keunggulan Kompetitif adalah, sebagai berikut “kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama.”[[50]](#footnote-51)

1. **Hipotesis**

**“dengan Kerjasama FLEGT-VPA yang memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra., Indonesia mampu meningkatkan nilai ekspor kayu dan produk turunannya ke Uni Eropa sekitar 10 persen sebelum implementasi hingga sesudah implementasi.”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis  (Teoritik) | Indikator  (Empirik) | Verifikasi  (Analisis) |
| *Variabel bebas:*  Peran Kerjasama FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa | * Sikap Uni Eropa dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup, termasuk permasalahan yang disebabkan oleh illegal logging dan permasalahan terkait maraknya kayu illegal yang masuk ke pasar Uni Eropa. * Tindakan Indonesia dalam menanggulangi illegal logging dan melaksanakan manajemen hutan lestari * Komitmen kedua pihak untuk menjual dan membeli produk kayu legal | * Data-data dan fakta -fakta mengenai terbentuknya FLEGT Action Plan tahun 2003 oleh Uni Eropa yang membawahi dua kebijakan yaitu EU Timber Regulation dan FLEGT-VPA * Data-data dan fakta -fakta yang menunjukkan pembangunan manajemen hutan lestari oleh Indonesia melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu * Data-data dan-fakta fakta yang menjelaskan terkait proses negosiasi ke dua pihak yang telah di mulai dari tahun 2007 hingga keberhasilan perilisan FLEGT-License di bulan November 2016 |
| *Variabel terikat:*  Dan kaitannya dalam peningkatan ekspor produk hasil hutan Indonesia ke Uni Eropa | * Indonesia sebagai Negara eksportir kayu * Indonesia sebagai salah satu Negara eksportir kayu di Uni Eropa * Aktivitas perdagangan kayu Indonesia di Uni Eropa | * Data-data dan fakta- fakta yang menunjukkan Indonesia sebagai Negara yang secara aktif melakukan aktivitas ekspor produk kayu dan produk hasil hutan merupakan salah satu komoditi utama Indonesia * Data-data dan fakta- fakta yang menunjukkan adanya kegiatan ekspor kayu di Negara-Negara anggota Uni Eropa * Data-data dan fakta- fakta jumlah ekspor kayu Indonesia, baik dari segi jumlah atau nilai yang dapat dilihat melalui penerbitan sertifikat V-Legal atau perilisan kayu dengan FLEGT-License di bulan November 2016 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**UNI EROPA**

**KERJA SAMA**

**INDONESIA**

**FLEGT-VPA**

**PASAR**

**COMMITMENTTO TACKLE ILLEGAL LOGGING**

**SVLK**

**PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**KEUNGGULAN KOMPARATIF**

**PENGUATAN EKSPOR**

**Kerjasama FLEGT-VPA Indonesia-Uni Eropa dan Kaitannya dalam Peningkatan Daya Ekspor Produk Hasil Hutan Indonesia ke Uni Eropa**

Gambar 1.1: Skema Teoritis

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan**
2. **Tingkat Analisis**

David J. Singer menganggap bahwa penggunaan peringkat analisis diperlukan sebagai alat analisis sistemik fenomena hubungan internasional. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis akan memaparkan terkait tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan tingkatan tingkat analisa yang digunakan dalam premis mayor dan premis minor yaitu sistem internasional dan negara, maka diketahui bahwa hubungan antara unit eksplanasi dan unit analisa pada penelitian adalah model reduksionis. Model reduksionis yaitu hubungan dimana variable independen memiliki kedudukan diatas variable dependen.

1. **Metode Analisis**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode penelitian,yaitu:

1. Metode Historis Analitis, adalah suatu metode yang digunakan untuk

menganalisa fenomena atau kejadian-kejadian masa lampau secara generalisasi untuk memahami situasi masa kini.

1. Metode Deskriptif Analitis, adalah suatu metode yang digunakan

untuk menggambarkan, mengklasifikasi serta menganalisis fenomena fenomena aktual.

1. Metode Korelasional Analitis, adalah suatu penelitian untuk

mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini team penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Kepustakaan, adalah penelusuran data-data yang bersumber dari

Bahan-bahan tulisan, baik dari buku, dokumen dokumen, dan media masa.

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**
3. **Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat**

Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286, Indonesia

1. **Perpustakaan Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan**

Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286, Indonesia

1. **Lama Penelitian**

Penelitian dimulai pada Januari 2017 dan direncanakan selesai di bulan Juni 2017 atau dalam kurun kurang lebih satu semester.

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah di dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menguraikannya dalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan menuju pokok permasalahan. Berikut, merupakan sistematika penulisan dari penelitian penulis:

**BAB I: PENDAHULUAN**, dalam bab ini penulis menyajikan pembukaan untuk memperkenalkan permasalahan yang diangkat. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II: DINAMIKA PEMBENTUKAN KERJASAMA FLEGT-VPA ANTARA INDONESIA-EU**, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang komitmen Uni Eropa dalam mengatasi illegal logging, Upaya Indonesia dalam penerapan SVLK dan Kerjasama Uni Eropa-Indonesia dalam kerangka FLEGT-VPA

**BAB III: AKTIVITAS EKSPOR PRODUK HASIL HUTAN INDONESIA KE UNI EROPA**, dalam bab ini penulis akan memaparkan lebih lanjut tentang produk hasil hutan Indonesia sebagai salah satu komoditi utama Indonesia, Proses masuknya produk Ekspor Indonesia ke Uni Eropa dan Dinamika perdagangan internasional produk hasil hutan berupa kayu Indonesia di Uni Eropa

**BAB IV: ANALISIS FLEGT VPA DALAM MENDORONG PENINGKATAN DAYA EKPOR PRODUK HASIL HUTAN INDONESIA KE UNI EROPA**, dalam bab ini akan dijelaskan korelasi antara bab II dan bab III melalui Keberhasilan Indonesia sebagai negara dengan FLEGT LICENSE pertama dan implikasinya terhadap peningkatan daya ekspor produk hasil hutan berupa kayu di Uni Eropa.

**BAB V: PENUTUP**, Dalam bab ini team penulis akan menarik kesimpulan atas hasil hasil penelitian yang didasarkan pada data data yang digunakan selama proses penelitian dan memberikan saran sebagai penutup dari penyusunan skripsi ini.

**BAB II**

**DINAMIKA PEMBENTUKAN KERJASAMA FLEGT-VPA ANTARA INDONESIA-EU**

1. **KOMITMEN UNI EROPA DALAM MENGATASI PEMBALAKKAN LIAR**
2. **Sikap Uni Eropa terkait Isu Lingkungan Hidup**

Uni Eropa pertama kali didirikan dengan latar belakang, bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan mengelola secara bersama produksi batu bara dan baja, dua bahan utama yang diperlukan untuk berperang.[[51]](#footnote-52) Sehingga dibentuk Komunitas Besi dan Baja Eropa (*European Coal and Steel Community /ECSC)* yang ditandai dengan penandatanganan traktat tahun 1951. Terdapat enam negara yang memprakarsai terbentuknya Uni Eropa, yaitu Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luksemburg, dan Belanda.

Uni Eropa bersifat unik karena para Negara Anggota tetap menjadi negara-negara berdaulat yang independen, akan tetapi mereka menggabungkan kedaulatan mereka – dan dengan demikian memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Dalam praktiknya, penggabungan kedaulatan berarti bahwa Negara-Negara Anggota mendelegasikan sebagian kuasa mereka dalam hal pengambilan keputusan

kepada lembaga-lembaga bersama yang telah didirikan. Sehingga keputusan untuk masalah-masalah tertentu yang melibatkan kepentingan bersama dapat diambil secara demokratis pada tingkat Eropa.[[52]](#footnote-53)

Uni Eropa sebagai aktor dalam aktivitas hubungan internasional, memiliki tingkat keaktifan yang besar dalam hubungan internasional, khususnya dalam corak hubungan kerjasama. Beberapa platform kerjasama dilakukan, baik antar organisasi kawasan seperti Uni Eropa dan ASEAN, ataupun Uni Eropa dengan negara bangsa seperti Amerika dan Turki. Eksistensi Uni Eropa sebagai aktor hubungan internasional memang tidak bisa dielak, karena pada perkembangan HI sendiri peran organisasi internasional sebagai aktor non negara saat ini sama pentingnya dengan aktor negara bangsa.

Sejalan dengan perubahan isu dalam hubungan internasional. Uni Eropa sebagai salah satu aktor hubungan internasional pun ikut serta dalam mentransformasi perhatian mereka terhadap isu internasional. Dahulu, hubungan internasional bersifat kaku dan seringkali hanya membahas permasalah permasalahan keamanan dan peperangan. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman permasalahan permasalahan yang menjadi isu hubungan internasional pun semakin berkembang.

Melihat tren internasional yang mulai menyoroti permasalahan *low politics* seperti permasalahan gender, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Uni Eropa pun mulai membangun berbagai macam kebijakan yang sejalan dengan pergeseran tren tersebut. Isu lingkungan hidup, agaknya menjadi salah satu isu yang semakin digiati oleh masyarakat Internasional. Sehingga, isu lingkungan hidup tidak luput dari perhatian Uni Eropa.

Keseriusan Uni Eropa dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup tidak dimulai ketika organisasi atau institusi ini berdiri. Namun, setelah *United Nations Conference on the Environment* diStockholm pada 1972 dan kesadaran masyarakat serta penemuan penemuan ilmiah terkait masalah lingkungan.[[53]](#footnote-54) Uni Eropa akhirnya menyadari pentingnya pembangunan sebuah komunitas yang secara serius membahas terkait isu lingkungan hidup. Di latar belakangi oleh hal tersebut, maka Uni Eropa membentuk *Environmental Action Programs* (EAP) di tahun 1973.[[54]](#footnote-55)

Keikutsertaan negara negara Uni Eropa dalam kerangka EAP menunjukkan bentuk perhatian suatu negara dalam isu lingkungan hidup. Setiap pertemuan EAP, akan di bahas berbagai macam isu lingkungan yang diangkat secara lebih spesifik. Pada pertemuan pertama di tahun pertama yaitu 1973, isu yang dibahas terkait polusi yang ditekankan pada polusi air dan udara. Pertemuan kedua mulai membahas lingkungan secara keseluruhan namun masih berfokus pada air dan udara dan pertemuan ketiga (1982-1986) menjabarkan tentang keuntungan dan kerugian yang diperoleh dengan menerapkan ramah lingkungan terhadap industri.

Pada pertemuan *Environmental Action Programs* yang keempat pada periode 1987-1992 , EAP mulai mencoba melahirkan seperangkat kebijakan yang disepakati bersama. Salah satu dari beberapa kebijakan yang diambil adalah kebijakan untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan ini kemudian semakin meningkatkan integrasi negara-negara Eropa terkait isu lingkungan dan berhasil melahirkan organisasi-organisasi yang peduli dengan lingkungan.

Pada pertemuan EAP kelima kembali dilakukan sistem desentralisasi kebijakan lingkungan. Selanjutnya, pada EAP keenam di tahun 20013, isu yang dibahas adalah terkait peningkatan kebijakan lingkungan. Pertemuan EAP akan terus berlanjut hingga nanti tahun 2020 berfokus untuk membahas permalahan mengenai perubahan iklim, perlindungan ekosistem, pemanfaatan sumberdaya, serta upaya penciptaan energi baru yang ramah lingkungan.[[55]](#footnote-56)

1. **Respon Uni Eropa dalam Deklarasi Bali tentang Forest Law Enforcement Governance**

Negara negara maju memang pada dasarnya, merupakan aktor aktor yang kian menunjukkan sikap kepedulian terhadap isu lingkungan hidup. Anggapan bahwa aktivitas sosial dan ekonomi manusia yang sedang berlangsung, dapat mengancam eksistensi dari lingkungan hidup. Dalam lima decade terakhir, populasi manusia yang terus meningkat telah mendorong standard kehidupan yang lebih tinggi pula. Hal itu semakin menunjukkan potensi kerusakan lingkungan hidup akibat konsumsi dari populasi masyarakat dunia yang terus bertambah.

Beberapa penstudi hubungan internasional sendiri telah menyatakan bahwa lingkungan hidup saat ini telah menjadi *issue area* utama ketiga, menyusul dua *issue area* utama tradisional dalam politik internasional yaitu; keamanan internasional dan ekonomi global.[[56]](#footnote-57) Penempatan lingkungan hidup dalam issue area politik internasional, memang telah menunjukkan urgensi permasalahan tersebut dalam taraf internasional. Urgensi dari permasalahan lingkungan hidup pun dapat dilihat melalui berbagai macam pertemuan tingkat nasional dan internasional yang dilakukan oleh aktor hubungan internasional dalam proses pencarian solusi dari permasalah tersebut.

PBB sendiri sebagai organisasi internasional yang berdiri semenjak tahun 1945, telah menunjukkan sikap simpati terhadap isu lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari dilaksanakannya Konferensi Lingkungan Hidup Manusia untuk pertama kali pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Selanjutnya, PBB terus melangsungkan pertemuan tingkat global terkait lingkungan hidup, seperti pertemuan besar di Rio De Janeiro pada tahun 1992 dan pertemuan tahunan lainnya.

Selain PBB, organisasi internasional yang juga menunjukkan simpati terhadap isu ini adalah *World Bank* atau Bank Dunia. Bank Dunia memang merupakan organisasi yang mengatur terkait permasalahan finansial dunia. Meskipun begitu, Bank Dunia juga menaruh simpati pada isu lain yang pada kelangsungannya bersinggungan dengan isu ekonomi, seperti lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup sendiri menurut Budi Winarno memang telah menjadi isu global yang mampu mendampingi agenda klasik dalam politik internasional, yakni isu keamanan dan ekonomi.

Bentuk simpati Bank Dunia dalam isu lingkungan hidup adalah melalui mengakomodasi wadah bagi negara negara terkait permasalahan lingkungan hidup. Salah satu bentuk akomodasi dari Bank Dunia tercermin melalui Bali Declaration on Forest Enforcement Law Governance (FLEG) pada tahun 2001 di Bali. Deklarasi Bali ini mempertemukan negara produsen dan konsumen kayu untuk memperoleh jalan tengah terkait permasalahan tersebut.

Adapun isi dari Deklarasi Bali ini merupakan urgensi untuk merespon secara cepat terkait isu lingkungan hidup berupa *illegal logging*, atau kejahatan hutan lainnya. Bentuk respon tersebut dapat dibangun melalui peningkatan kualitas regulasi terkait permasalah tersebut, baik dari skala nasional hingga global. Peningkatan kualitas regulasi dalam tingkat global sendiri dapat ditempuh melalui kolaborasi bilateral, regional ataupun multilateral.

Kolaborasi bilateral, regional ataupun multilateral dalam lampiran dari Deklarasi Bali meliputi pembentukan kerjasama yang secara signifikan memiliki implikasi dalam pelarangan terhadap permasalahan *illegal logging* dan penjualan kayu illegal. Bentuk lainnya meliputi pembangunan sistem sertifikasi kayu illegal yang mudah di akses dan murah bagi industri-industri kecil. Sekaligus mengembangkan jaringan regional dalam *monitoring system*, termasuk di dalamnya *forest-crime monitoring*.[[57]](#footnote-58)

Meskipun Deklarasi Bali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara tegas. Beberapa negara tetap secara serius berusaha mengamalkan isi hasil deklarasi dengan membangun sebuah sistem terkait permasalahan illegal logging, baik melalui pembentukan kerangka regulasi yang ketat ataupun melalui pembentukan sistem sertifikasi kayu legal. Salah satu aktor hubungan internasional yang menyeriusi permasalahan ini adalah Uni Eropa.

Selang dua tahun setelah deklarasi ini. Uni Eropa membangun sebuah rencana aksi yang disebut *FLEGT-Action Plan*. FLEGT Action Plan bertitik fokus pada kebijakan perdagangan kayu dan produk kayu. Selain sebagai respon dari hasil Deklarasi Bali, pembentukkan rencana aksi tersebut pun tidak terlepas dari kondisi Uni Eropa sebagai salah satu konsumen kayu terbesar di pasar global yang diestimasi telah mengalami kerugian akibat banyaknya kayu illegal yang beredar bebas di pasar Uni Eropa.

*FLEGT-Action Plan* ini pada perkembangannya membawahi dua buah perturan, yaitu Peraturan Kayu Uni Eropa dan FLEGT-VPA atau Kerjasama Sukarela terkait Penegakan Hukum Tata Kelola Perdagangan Sektor Perdagangan. Selain sebagai respon dan kepentingan kawasan dalam memerangi permasalahan lingkungan hidup. Rencana Aksi ini pun merupakan bentuk bantuan kepada negara produsen dalam bentuk tata kelola pengelolaan hutan lestari, khususnya di bidang penjualan produk hasil hutan sektor Kayu.

1. **PERJALANAN INDONESIA DALAM MENERAPKAN SVLK (SERTIFIKASI VALIDITAS LEGALITAS KAYU)**
2. **Kondisi Hutan Indonesia**

Pada tahun 2000-an praktik illegal logging diestimasi membawa kerugian sebesar 80% dari total panen Indonesia.[[58]](#footnote-59) Praktik perdagangan kayu ilegal sangat merugikan banyak pihak karena dapat menyebabkan permasalahan permasalahan yang lain. Perdagangan kayu menyebabkan meluasnya praktik deforestasi, mempengaruhi kehidupan komunitas yang bergantung pada hutan, pencurian miliaran pendapatan Negara dan menghancurkan habitat utama hewan hewan liar.[[59]](#footnote-60)

*Illegal logging* merupakan salah satu alas an dari berkurangnya area tutupan hutan. Berdasarkan majalah GEO pada tahun 2011, dikatakan bahwa pada periode tahun 2005 hingga 2010, Indonesia mengalami degradasi luas hutan sebesar 6850 km2 pertahunya.[[60]](#footnote-61) Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara dengan peringkat ketiga dalam peringkat kehilangan hutan setelah Brazil dan Australia.[[61]](#footnote-62)

Ditahun 2009 sendiri, luas tutupan hutan Indonesia adalah 88,17 juta ha atau sekitar 46,33 persen dari luas daratan Indonesia. Sebaran tutupan hutan terluas berada di Pulau Papua dengan persentase sebesar 38,72 persen dari total luas tutupan hutan Indonesia, atau sekitar 34,13 juta ha.[[62]](#footnote-63)Dalam periode tahun 2000-2009, luas hutan Indonesia yang mengalami deforestasi adalah sebesar 15,16 juta ha. Pulau Kalimantan menjadi daerah penyumbang deforestasi terbesar yaitu sekitar 36,32 persen atau setara dengan 5,50 juta ha.[[63]](#footnote-64)

Data FWI terkait pengurangan wilayah tutupan hutan pun tidak jauh berbeda dengan data yang dimiliki oleh Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. Berdasarkan catatan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.[[64]](#footnote-65)

1. **Tuntutan untuk Membangun Sistem Tata Kelola Hutan di Indonesia**

Berdasarkan data kehilangan tutupan hutan yang menunjukkan rata rata kehilangan area tutupan hutan sekitar 1 juta hektar pertahun. Kehilangan tutupan hutan tersebut tidak hanya terjadi pada Indonesia saja, tetapi juga negara negara dengan wilayah tutupan hutan lainnya, seperti Brazil dan Australia. Kehilangan area tutupan hutan tentunya menjadi permasalahan masyarakat internasional secara luas, karena hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumberdaya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia.[[65]](#footnote-66)

Kerusakan hutan dapat berdampak kepada semua pihak. Beberapa dampak umum yang mampu merugikan mahluk hidup adalah perubahan iklim, punahnya spesies-spesies yang ada di hutan dan terganggunya siklus air. Mengingat hal tersebut secara kontinum dapat mengganggu segala aspek kehidupan mahluk hidup, maka masyarakat internasional mulai menunjukkan kekhawatiran yang mendalam terkait hal tersebut.

Kekhawatiran masyarakat internasional menjadi input bagi pemerintah dalam membangun sebuah kebijakan. Salah satu bentuk output atau kebijakannya adalah dengan mendorong pemerintah yang ramah lingkungan. Upaya itu dapat dilihat dari dibangunnya suatu sistematika kerjasama baik dalam bentuk kerjasama bilateral, multilateral atau perjanjian internasional yang berbentuk deklarasi.

Deklarasi Bali sendiri merupakan salah satu bentuk kebijakan yang bermaksud untuk mendorong negara negara dalam membentuk sistem tata kelola hutan yang baik. Berdasarkan lampiran *Ministerial Declaration Indicative List of Actions for the Implementation of Declaration*, dijelaskan bahwa bentuk pembangunan tata kelola hutan dapat dibentuk melalui peningkatan kualitas regulasi terkait permasalah tersebut, baik dari skala nasional hingga global. Peningkatan kualitas regulasi dalam tingkat global sendiri dapat ditempuh melalui kolaborasi bilateral, regional ataupun multilateral.

Negara-negara maju seperti Inggris, Australia, dan Jepang telah membangun sebuah sistem sertifikasi sebagai salah satu bentuk pembangunan tata kelola hutan. Negara Inggris membangun sistem dengan nama*Programme for the Endorsement of Forest Certification,* Australia dengan *Illegal Logging Prohibition Act* dan Jepang dengan *goho-wood system*. Semua sistem sertifikasi legalitas kayu pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu, untuk membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya megatasi persoalan pembalakan liar.

Seperti yang diketahui, bahwa illegal logging memang merupakan salah satu penyebab dari deforestasi. Cara penyelesaian permasalahan *illegal logging* salah satunya adalah dengan memotong perdagangan kayu illegal, melalui pengawasan transaksi kayu ilegal melalui sertifikasi (labelling) atas asal-usul kayu.[[66]](#footnote-67)

Akibat tuntutan pembangunan tata kelola hutan yang baik, serta manfaat dari pembangun sertifikasi kayu legal yang secara langsung dapat mengawasi laju perdagangan kayu dari hulu ke hilir. Maka, pemerintah Indonesia akhirnya membangun sebuah sistem serupa yang diberi nama Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK).

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia . Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.[[67]](#footnote-68)

Latar belakang dari SVLK sendiri seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah sebagai komitmen pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal. Perwujudan *good forest governance* menuju pengelolaan hutan lestari. Permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, khususnya dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Sebagai bentuk *"National Insentive*" untuk mengantisipasi semakin maraknya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing, seperti skema FSC, PEFC, dsb.[[68]](#footnote-69)

SVLK mulai berlaku sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 20 Peraturan Menteri Kehutanan No.38/Menhut-II/2009 bahwa peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Juni 2009 dan mulai dilaksanakan pada tanggal sejak 1 September 2009.[[69]](#footnote-70)

1. **KERJASAMA UNI EROPA DAN INDONESIA DALAM KERANGKA FLEGT VPA**
2. **Kerjasama FLEGT-VPA antara Uni Eropa dan Indonesia**

FLEGT-VPA adalah singkatan dari Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement (Penegakan Hukum, Tata Kelola danPerdagangan Bidang Kehutanan) dan merupakan perjanjian bilateral bersifat sukarelaantara UE dan negara-negara produsen kayu dalam mengatasi illegal logging melalui mekanisme penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan bidang kehutanan.

FLEGT-VPA merupakan mekanisme yang dibuat Uni Eropa dalam merespon illegal logging. Uni Eropa sebagai konsumen kayu telah mengalami dampak illegal logging, dimana hampir sebagian dari kayu yang masuk ke Uni Eropa diestimasi illegal.[[70]](#footnote-71) Mekanisme dari perjanjian ini yaitu upaya penegakkan hukum untuk tindak pelanggaran illegal logging, tata kelola bidang lingkungan selama proses pemanfaatannya bernilai ekonomis dan perdagangan. Bidang lingkungan dengan sasaran kehutanan, dan bidang perdagangan dengan sasaran proses ekspor impor kayu legal.[[71]](#footnote-72)

Kerjasama FLEGT-VPA sendiri menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diartikan sebagai Perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra.[[72]](#footnote-73)

Sebelum dibangunnya, FLEGT Action Plan, Uni Eropa mencanangkan terlebih dahulu FLEGT, FLEGT pertama kali dibahas pada September 2001 di Indonesia pada Konferensi Tingkat Menteri Pertama di Asia Timur dan Pasifik.45 Selanjutnya program ini disampaikan pada pertemuan puncak dunia untuk pembangunan berkelanjutan (*The World Summit on Sustainable Development*) di Johannesburg tahun 2002.[[73]](#footnote-74)Tujuan dari FLEGT yakni untuk:

1. Membantu negara produsen kayu dalam meningkatkan tata kelola dan kemampuan memberantas illegal logging

2. Mengembangkan voluntary partnership agreement (VPA) untuk mencegah masuknya kayu ilegal ke pasar UE

3. Mencegah konsumsi kayu ilegal dan investasi UE pada kegiatan yang mendorong pencurian kayu (over cutting).[[74]](#footnote-75)

Selanjutnya, program FLEGT ini dilanjutkan dalam kerangka FLEGT Action Plan yang membawahi dua peraturan yaitu, EU Timber Regulation dan FLEGT-VPA. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa FLEGT-VPA merupakan bentuk kebijakan perdagangan kayu legal antara Uni Eropa dan negara mitra. Uni Eropa dibawah FLEGT-VPA telah membangun kerjasama dengan beberapa negara mitra seperti, Republik Congo, Gabon, Ghana, Laos, Malaysia dan Cameroon, serta Indonesia.

Kerjasama FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa sendiri ditandatangani pada 30 September 2013.[[75]](#footnote-76)Pada 27 Februari 2014, Parlemen Eropa meratifikasi Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT ) Voluntary Partnership Agreement (VPA) dengan pemerintah Indonesia. VPA ini dirancang untuk mendorong peningkatan tata kelola hutan dan penegakan hukum kehutanan dan mendukung pengelolaan hutan lestari sebagai bagian dari upaya dunia menghentikan kegiatan penggundulan dan kerusakan hutan.[[76]](#footnote-77)

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum perjanjian kemitraan antara negara produsen kayu dan Uni Eropa terkait perdagangan kayu legal ini. Adapun tahapan-tahapan tersebut, meliputi:[[77]](#footnote-78)

1. ***Pre Negotiation***

Pada tahapan ini Negara Produsen Kayu menunjukkan ketertarikan kepada Uni Eropa dalam membangun kerjasama FLEGT-VPA. Selama tahap ini, kedua pihak akan mengeksplorasi kepentingan dan kesulitan dalam keterlibatan pada proses ini.

1. ***VPA Negotiation***

Pada tahapan ini, kedua pihak mencapai kesepakatan pada elemen kunci dari VPA, termasuk sistem jaminan legalit dan langkah-langkah lain yang harus dilaksanakan sebelum proses implementasi.

1. ***Initialling***

Tahapan ini menandakan berakhirnya proses negosiasi. Pada tahap ini biasanya kedua pihak (Uni Eropa dan Negara Eksportir Kayu) melakukan upacara peresmian.

1. ***Ratification***

Tahapan ini menunjukkan bahwa FLEGT-VPA antara Uni Eropa dan Negara Mitra telah berketetapan hukum.

VPA mengikat secara hukum ketika kedua pihak telah melakukan ratifikasi. Proses ratifikasi membutuhkan beberapa bulan sampai lebih dari setahun, tapi selama waktu itu, dua pihak dapat mulai mengembangkan lisensi Legality Assurance System. FLEGT yang disepakati tidak akan diberikan sampai VPA telah diratifikasi dan unsur-unsur LAS telah bekerja. Jika tahapan tahapan diatas telah terlewati, maka sejak saat itu dan seterusnya, hanya kayu FLEGT dapat diekspor dari negara mitra ke pasar Uni Eropa. Perjanjian yang awalnya merupakan kerjasama sukarela sudah berubah menjadi kerjasama yang *legal binding* karena memiliki ketetapan hukum.[[78]](#footnote-79)

Perundingan VPA antara Indonesia dan Uni Eropa sendiri telah dimulai pada bulan Januari 2007 tetapi barulah setelah bulan Juli 2009 dialog semakin intensif setelah diselesaikannya sistem jaminan legalitas kayu Indonesia (TLAS). Di bawah VPA, Indonesia perlu : (1) menentukan peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk sektor kehutanan, dan (2) membangun sebuah sistem untuk memverifikasi legalitas ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa sesuai aturan yang berlaku[[79]](#footnote-80).Dua hal tersebut perlu dipenuhi sebelum mekanisme kerjasama FLEGT-VPA dapat bekerja. Sehingga Uni Eropa mendorong Indonesia untuk meningkatkan penggunaan Timber Legal Assurance System (TLAS) agar kerjasama ini dapat berjalan secara ideal. Timber Legal Assurance System di Indonesia di bentuk dalam nama Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

FLEGT-VPA memiliki tiga elemen penting yang tidak bisa dilepas. Tiga elemen tersebut meliputi, Pendefinisian Legalitas, Pengembangan Legality Assurance System (LAS) dan Audit Independen.[[80]](#footnote-81) Sehingga, jelas bahwa meskipun FLEGT-VPA bersifat Government to Government atau G to G, Uni Eropa mendorong transparansi yang melibatkan masyarakat (civil societies), Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu atau Lembagai Penilai Swasta.

Setelah dialog panjang dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, asosiasi perdagangan dan organisasi masyarakat sipil, definisi legal untuk Sistem Verifikasi Kayu SVLK dibuat dalam dua peraturan tahun 2009 (Peraturan Kementerian Kehutanan P.38/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan no. P.6/VI-Set/2009 ). Aturan ini tidak hanya mengenai legalitas kayu tapi juga tentang tata kelola hutan lestari. Kedua aturan ini dibingkai dengan prinsip-prinsip kunci yang meliputi aspek penting dalam produksi produk kehutanan, pengelolaan dan kriteria, indikator dan pelaku verifikasi, juga tentang pedoman pelaksaan verifikasi yang menjabarkan metodologi dan norma penilaian yang digunakan.[[81]](#footnote-82)

Indonesia menetapkan sertifikasi SVLK sebagai sebuah kewajiban bagi seluruh perusahaan yang memproduksi, menjual, mengelola dan mengekspor kayu. Sejumlah badan sertifikasi dan verifikasi independen diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk mengaudit operasional perusahan-perusahaan perkayuan. Audit dilakukan berdasarkan standard penilaian legalitas atau tata kelola hutan lestari dan sertifikat yang dikeluarkan untuk Legalitas Kayu, LK atau Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PHPL. Dokumen V-Legal dikeluarkan untuk eksportir.[[82]](#footnote-83)

Sebagai langkah pelengkap untuk Kesepakatan Kemitraan VPA, Peraturan Perkayuan Uni Eropa (EU Timber Regulation-EUTR) diberlakukan Maret 2013, melarang penjualan produk kayu yang dipanen secara illegal di wilayah Uni Eropa. EUTR menerima produk yang mendapatkan izin FLEGT dari Negara-negara yang berada dalam Kemitraan VPA, sebagai produk legal secara otomatis. Perizinan FLEGT untuk produk Indonesia baru bisa dijual hanya ketika sistem SVLK terbukti menyediakan jaminan yang kredibel untuk legalitasnya.[[83]](#footnote-84)

Dasar hukum SVLK sendiri meliputi Permenhut P.38/Menhut-II/2009 jo Permenhut P.68/Menhut-II/2011 jo Permenhut P.45/ Menhut-II/2012 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Penge lolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Sedangkan,pedoman pelaksanakan dan standar SVLK diatur dalam Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. : P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).[[84]](#footnote-85)

SVLK diterapkan melalui mekanisme sertifikasi oleh pihak independen (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu/LVLK) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Adapun terdapat tahapan yang perlu dilalui sebelum memperoleh SVLK, yaitu:[[85]](#footnote-86)

1. Pengajuan aplikasi ke Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu,
2. Tinjauan Dokumen
3. Penetapan Jadwal & Tim Audit
4. Publikasi Rencana Audit di website Kemenhut, LVLK, desa/kelurahan tempat industri berada atau media massaAudit lapangan
5. Pengambilan keputusan sertifikasi
6. Penerbitan sertifikat
7. Publikasi sertifikat yang diterbitkan

Manfaat yang diperoleh perusahaan ketika memperoleh sertifikat ini, yaitu 1) hemat waktu dan biaya untuk penerbitan dokumen V-LEGAL dengan tidak diwajibkan untuk inspeksi., 2) Meningkatkan kepercayaan buyer terhadap legalitas produk yang diekspor, 3) Wujud kepatuhan terhadap peraturan pemerintah., 4) Dapat menggunakan tanda V-LEGAL pada produk.[[86]](#footnote-87)

1. **Perilisan FLEGT License antara Indonesia dan Uni Eropa**

Perjanjian FLEGT-VPA mengharuskan Negara produsen kayu mengekspor produk kayu menggunakan sertifikasi V-legal. Hal ini dimaksudkan agar setiap kayu yang keluar dari Negara produsen untuk di jual ke kawasan Uni Eropa. V-legal sendiri merupakan lisensi ekspor Indonesia untuk membuktikan legalitas..

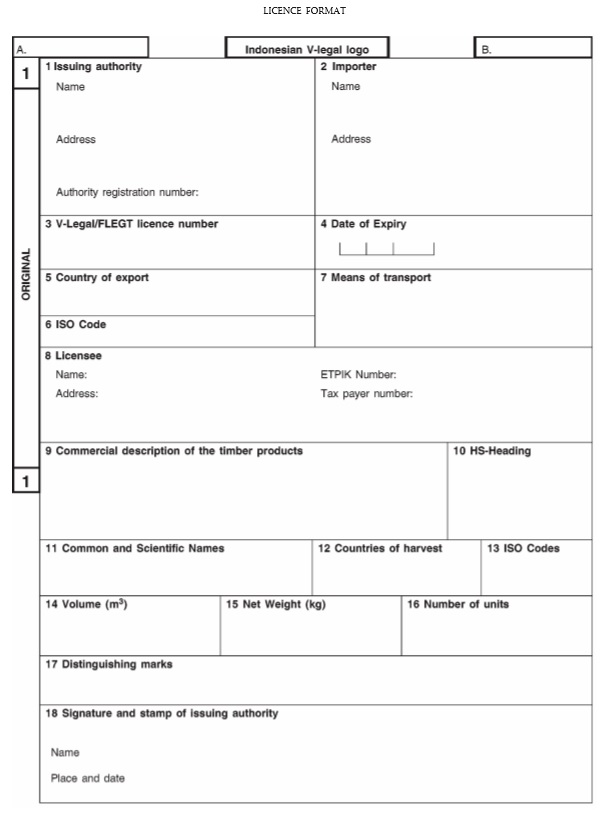
Perusahaan yang sesuai dengan sistem jaminan legalitas kayu (SVLK) harus melampirkan Dokumen V-Legal untuk produk mereka yang akan di ekspor ke setiap pasar internasional. Dokumen V-Legal menetapkan bahwa produk kayu yang diangkut sesuai dengan legalitas atau standar keberlanjutan dan persyaratan kontrol rantai pasokan sebagaimana diatur dalam peraturan Indonesia dan VPA[[87]](#footnote-88). Jadi Dokumen V-Legal memberikan jaminan bahwa kayu atau produk kayu yang legal. Sehingga, V-legal merupakan instrumen penting dalam aktivitas ekspor Indonesia, khususnya ke Uni Eropa

Penerbitan V-legal dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu atau yang kenal juga sebagai Lembaga Penilai Swasta yang telah mengantongi izin dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Pada proses penilaian sendiri, LVLK dituntut untuk transparan karena harus menyertakan pengawasan oleh *civil societies* dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Ketika proses implementasi Timber Legality Assurance System sudah bekerja dengan baik. Dalam kasus Indonesia, hal ini dinilai melalui performa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Pada tahapan selanjutnya, maka berdasarkan lampiran Voluntary Partnership Agreement Pasal 6,   
Indonesia akan menerbitkan Dokumen V-Legal sebagai FLEGT lisensi untuk kayu yang diekspor ke Uni Eropa.

**Gambar 2.1**

**Format Template Dokumen Ekspor Indonesia dengan penggunaan V-Legal**



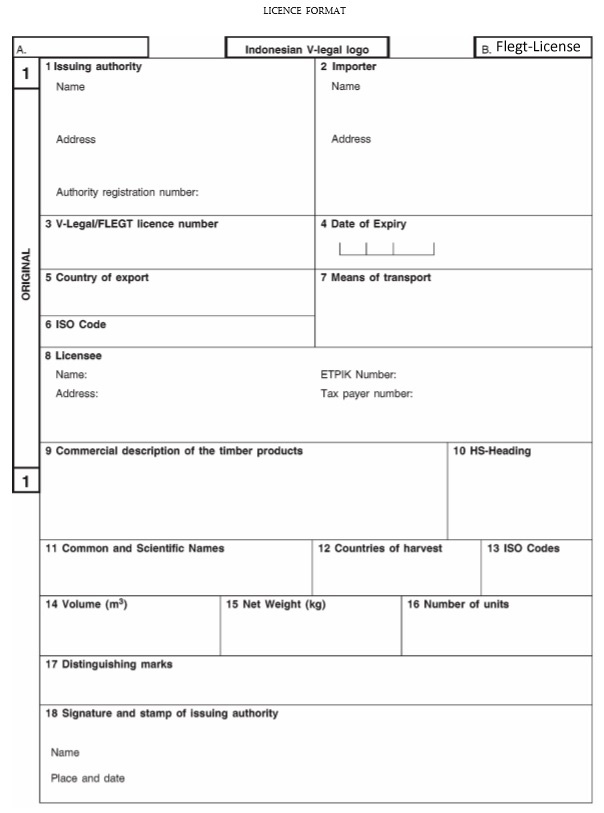
Sumber: Lampiran 1V Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dam Indonesia

Template yang digunakan oleh *FLEGT-License*sama dengan Template yang dilampirkan pada lampiran IV perjanjian Kemitraan Sukarela antara Indonesia dan Uni Eropa. Letak perbedaanya terletak pada dituliskannya keterangan *FLEGT-license* pada bagian kanan atas dari dokumen. Sehingga*, FLEGT-license* mirip dengan Dokumen V-Legal, namun memiliki keterangan 'FLEGT license' ditulis dalam kotak bertanda 'B'. Lisensi FLEGT akan menggantikan Dokumen V-Legal untuk ekspor ke Uni Eropa ketika Indonesia mulai mengimplementasikan *FLEGT-license*.

Indonesia sendiri bersama Uni Eropa telah menyetujui waktu perilisan *FLEGT-license*. Waktu yang disetujui tersebut adalah pada tanggal 15 November 2016. Keputusan ini dicapai dalam sidang Komite Implementasi Gabungan (Joint Implemenation Committee – JIC) ke-5, yang mengawasi pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan Sukarela Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan (FLEGT VPA) Indonesia-UE.[[88]](#footnote-89)

**Gambar 2.2.**

**Format Template Dokumen Ekspor Indonesia dengan penggunaan *FLEGT-License***



Sumber: Lampiran 1V Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dam Indonesia, diolah

Lisensi FLEGT ini secara otomatis memenuhi persyaratan Peraturan Perkayuan Uni Eropa, EUTR, (EU Reg.#995/2010), yang melarang para pelaku pasar di Uni Eropa untuk menempatkan kayu hasil pembalakan liar serta produk yang berasal dari kayu ilegal di pasar Uni Eropa. Para importir produk kayu berlisensi FLEGT dapat menempatkan barang-barang impor mereka dalam pasar Uni Eropa tanpa perlu melaksanakan pola manajemen risiko (uji tuntas).[[89]](#footnote-90)

Tidak wajibnya, *due diligence* atau syarat uji tuntas dapat meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia karena tidak perlu lagi untuk pembiayaan administrasi lainnya. Selain itu FLEGT-License memudahkan produk produk kayu Indonesia, sehingga masuk *green line* oleh bea cukai.

1. Hayyan Setiawan,” Hasil Hutan Bukan Kayu” dalam <http://ilmuhutan.com/hasil-hutan-bukan-kayu/>, diakses 10 Febuari 2017. [↑](#footnote-ref-2)
2. “Sikap UE terhadap Isu-isu Ekonomi Global” dalam [*http://www.indonesianmission-eu.org/website/page30961153720030825753735.asp*](http://www.indonesianmission-eu.org/website/page30961153720030825753735.asp)*,* diakses 21 January 2017. [↑](#footnote-ref-3)
3. Bambang Tri Bawono dan Anis Masdurohatun, *Penegakkan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya,* Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=3802&val=310>, diakses 21 January 2007 [↑](#footnote-ref-4)
4. Kementerian Kehutanan, “Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa Informasi Ringkas” dalam <http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23029/Kesepakatan+Kemitraan+Sukarela+FLEGT+antara+Indonesia+dan+Uni+Eropa+-+Informasi+Ringkas+Mei+2011/1cc9e1e7-659e-45e8-938c-c4751a3fd27d>, diakses 22 January 2017 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid., [↑](#footnote-ref-6)
6. “VPA Countries: Indonesia” dalam <http://www.euflegt.efi.int/indonesia>, diakses 22 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-7)
7. Mahaputri Handayani,” Upaya Indonesia dalam Mendapatkan Akses Pasar Produk Kayu di Uni Eropa melalui Kerja sama FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade )-VPA (Voluntary Partnership Agreements)”, SKRIPSI HI-FISIP Universitas Andalas, diterbitkan 2016, hlm, 2. [↑](#footnote-ref-8)
8. SILK(Sistem Informasi Legalitas Kayu) “Apa dan Bagaimana SVLK?” dalam <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/3>, diakses 22 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-9)
9. Kementrian Kehutanan. Loc.Cit., [↑](#footnote-ref-10)
10. Agus Sarsito, “Perkembangan terbaru FLEGT-VPA “ kertas kerja disajikan dalam Seminar Nasional Melihat Kesiapan Indonesia dalam Penerapan Lisensi FLEGT, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, Akmani Hotel Jakarta, 4 Agustus 2016,hlm. 1. [↑](#footnote-ref-11)
11. Martin Griffith dan Terry O ‘Callaghan. International Relation: The Key Concept. Hal. Vii. 2002. [↑](#footnote-ref-12)
12. Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: CAPS Center of Academic Publishing Service,2014), hlm. 139. [↑](#footnote-ref-13)
13. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 11. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid., hlm. 8. [↑](#footnote-ref-15)
15. Citra Hennida, *Rezim dan Organisasi Internasional*(Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 7 [↑](#footnote-ref-16)
16. Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Terjemahan Dadan Suryadioura) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 88. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid., hlm. 141. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid., hlm. 155. [↑](#footnote-ref-19)
19. Citra Hennida, Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibid. [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid., hlm. 8. [↑](#footnote-ref-22)
22. Ibid., hlm. 52. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibid., hlm. 49. [↑](#footnote-ref-24)
24. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Op.cit., .hlm. 5. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid., hlm. 33. [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid., hlm. 34 [↑](#footnote-ref-27)
27. Yuli Trisnawati, “Penempatan Pasukan Militer Amerika Serikat di Australia”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (1): 59-70. ISSN 0000-0000, dalam ejournal.hi.fisip-unmul.org, diakses 18 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-28)
28. F. Qurrata Ayyun, “Tinjauan Pustaka” dalam repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../BAB-%20II.docx?...4, diakses 30 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-29)
29. “Konsep Dasar Kerjasama internasional” dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Anik%20Widiastuti,%20S.Pd.,%20M.Pd./KI%201%20KONSEP%20DASAR%20KERJASAMA%20INTERNASIONAL.pdf>., diakses 30 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-30)
30. Tiara Maharanie, “Diplomasi Ekonomi: Fungsi dan Peranan dalam Ekonomi Modern”, dalam <https://www.academia.edu/9607271/Diplomasi_Ekonomi_Fungsi_dan_Peran_dalam_Ekonomi_Modern>, diakses 10 Febuari 2017. [↑](#footnote-ref-31)
31. Ibid., [↑](#footnote-ref-32)
32. Anak Agung Banyu Perwita, “Optimalisasi Diplomasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional” Tabloid Diplomasi Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia No. 40 Tahun IV Tgl. 15 Februari - 14 Maret 2011, dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2011/Diplomasi%20Februari%202011.pdf>, diakses 10 Febuari 2017 [↑](#footnote-ref-33)
33. Kementrian Kehutanan., Loc.Cit., [↑](#footnote-ref-34)
34. Barry J. 2014. *Political Ideologies: Green Political Theory*. London: Routledge. Dalam http://pure.qub.ac.uk/portal/files/5420698/Green\_Political\_Theory\_John\_Barry.pdf , diakses 5 April 2017. Hlm. 1. [↑](#footnote-ref-35)
35. Terjemahan bebas dari Axel Marx, Emilie Bécault and Jan Wouters*. 2011. Global Forest Governance: Bringing Multilateralism Back In. dalam* [*https://ecpr.eu/filestore/paperproposal/c0fa8866-3dd1-4474-a5cd-ddeb511b50ac.pdf*](https://ecpr.eu/filestore/paperproposal/c0fa8866-3dd1-4474-a5cd-ddeb511b50ac.pdf)*, diakses 5 April 2017.* [↑](#footnote-ref-36)
36. Komite Akreditasi Nasional. “dalam<http://www.kan.or.id/?page_id=426>, diakses 26 Febuari 2017. [↑](#footnote-ref-37)
37. Natural Resources Development Center, “Konsep dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Implementasinya” dalam <http://www.nature.or.id/publikasi/laporan-dan-panduan-kehutanan/modul-pengelolaan-hutan-produksi-lestari.pdf>, hlm. 8, diakses 26 Febuari 2017. [↑](#footnote-ref-38)
38. Multistakeholder Forestry Programme, “Tanya Jawab Sistem Verifikasi Legalitas Kayu” dalam <https://www.mfp.or.id/attachments/article/78/150831_Tanya_jawab_SVLK.pdf>, diakses 26 Febuari 2017. [↑](#footnote-ref-39)
39. Umar Suryadi Bakry, *Suatu Pengantar: Ekonomi Politik Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 104. [↑](#footnote-ref-40)
40. Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi: Ekonomi Internasional*( Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1994), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-41)
41. Ibid. [↑](#footnote-ref-42)
42. Ibid. [↑](#footnote-ref-43)
43. Amsah Hendri Doni, dkk. “Prospek Perdagangan Internasional dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi. Volume 1 Nomor 1, Mei 2012.202 dalam <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekonomi/article/download/744/613>, diakses 29 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-44)
44. Tulus. T.H. Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2004),hlm. 42. [↑](#footnote-ref-45)
45. Umar Suryadi Bakry, Op.Cit., hlm 104-119. [↑](#footnote-ref-46)
46. Tulus T.H Tambunan, Op.Cit., hlm. 57. [↑](#footnote-ref-47)
47. Ibid., 57-65 [↑](#footnote-ref-48)
48. Ani Rahimah. “Materi Kuliah Kepabenaan: Administrasi Kepabenaan dan Ekspor Impor” dalam <http://annirahimah.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/AKE-1-up.pdf>, diaskses 26 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-49)
49. Ibid., [↑](#footnote-ref-50)
50. Wikipedia, “Keunggulan Kompetitif” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Keunggulan\_kompetitif , diakses 31 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-51)
51. European External Action Service, “ Sekilas Uni Eropa” dalam <http://eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2015_euataglance_id.pdf>, diakses 16 Febuari 2017. [↑](#footnote-ref-52)
52. Ibid., [↑](#footnote-ref-53)
53. Christian Hey. *EU Environmental Policies: A short history of the policy strategies.* EU Enviromental Policy Bookdalam<http://www.eeb.org/publication/chapter-3.pdf>, diakses 16 Febuari 2017. Hlm, 4. [↑](#footnote-ref-54)
54. Ibid., [↑](#footnote-ref-55)
55. Ibid., [↑](#footnote-ref-56)
56. Robert Jackson dan George Sorensen. Op.Cit. 324 [↑](#footnote-ref-57)
57. Annex to the Ministerial Declaration Indicative List of Actions for the Implementation of Declaration. Hal 1-4 [↑](#footnote-ref-58)
58. Moazzam Malik. “ Indonesia reachers historic milestone in combating illegal logging.” dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2016/11/25/indonesia-reaches-historic-milestone-combating-illegal-logging.html>, diakses 9 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-59)
59. Ibid., [↑](#footnote-ref-60)
60. ACJP Cahayahati. “Indonesia kehilangan hutan 6850 km2 pertahunnya (2005-2010)” dalam <http://www.kompasiana.com/kritzel/indonesia-kehilangan-hutan-6850-km2-per-tahun-2005-2010_55189391a333114607b665eb>, diakses 9 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-61)
61. Ibid., [↑](#footnote-ref-62)
62. Forest Watch Indonesia. “ Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009”, hlm 5. dalam<http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2013/02/PHKI_2000-2009_FWI_low-res.pdf>, diakses 9 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-63)
63. Ibid., [↑](#footnote-ref-64)
64. WWF “Kehutanan” dalam <http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/>, diakses 9 Maret 1017 [↑](#footnote-ref-65)
65. Rahmawaty, “Hutan: Fungsi dan Peranannya bagi Masyarakat”, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1028/1/hutan-rahmawaty6.pdf>, diakses 10 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-66)
66. Arya Hadi Dharmawan, Bramasto Nugroho, Hariadi Kartodihardjo, Lala M Kolopaking dan Rizaldi Boer” SVLK, JalanMenuju REDD+” dalam forestclimatecenter.org/document\_hit.php?lang=Indonesia&dID=58, diakses 10 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-67)
67. Sere Saghranie Daulay dan Widyaiswara Madya, “ Regulasi bagi Industri Berbasis Kayu dan Hasil Hutan” dalam [www.kemenperin.go.id/.../Regulasi-Bagi-Industri-Berbasis-Kayu-dan-Hasil-Hutan](http://www.kemenperin.go.id/.../Regulasi-Bagi-Industri-Berbasis-Kayu-dan-Hasil-Hutan), diakses 10 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-68)
68. Ibid., [↑](#footnote-ref-69)
69. Ibid., [↑](#footnote-ref-70)
70. Anita Novianti Sofyan,” Kerja Sama Uni Eropa-Indonesia dalam Mengatasi *Illegal Logging dalam Kerangka Kerjasama FLEGT-VPA*”, SKRIPSI HI-FISIP Universitas Hasanudin, diterbitkan 2014, hlm. 47 [↑](#footnote-ref-71)
71. Ibid., [↑](#footnote-ref-72)
72. Kementrian Kehutanan., Loc.Cit., [↑](#footnote-ref-73)
73. Anita Novianti Sofyan. Op.cit. Hlm. 48. [↑](#footnote-ref-74)
74. Ibid., [↑](#footnote-ref-75)
75. Clarissa Diva C. Savirra .*Analis Faktor Supply & Demand Driven Terhadap Insistensi Indonesia Dalam Mewujudkan Perjanjian Kerjasama FLEGT-VPA 2007-2011*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol.3 No.3 Tahun 2014. Dalam <http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI8132-11f2e9f7d0fullabstract.pdf>, diakses 10 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-76)
76. Koalisi Anti Mafia Hutan, “Catatan Kritis Koalisi LSM terhadap Legalitas & Kelestarian Hutan Indonesia: Studi Independen Terhadap Sertifikasi SVLK”, http://awsassets.wwf.or.id/downloads/perbaiki\_svlk\_kajian\_koalisi\_anti\_mafia\_hutan\_terhadap\_svlk.p df, (diakses 27 April 2015),hal 3. [↑](#footnote-ref-77)
77. Logging off “What Are Flegt’s VPA” dalam <http://www.fern.org/sites/fern.org/files/What%20are%20FLEGT%20VPAs.pdf>, diakses 14 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-78)
78. Ibid., [↑](#footnote-ref-79)
79. Koalisi Anti Mafia Hutan.Loc.Cit., [↑](#footnote-ref-80)
80. Logging Off. Loc.Cit., [↑](#footnote-ref-81)
81. Ibid., [↑](#footnote-ref-82)
82. Ibid., [↑](#footnote-ref-83)
83. Ibid.,hal. 4. [↑](#footnote-ref-84)
84. WWF. “SVLK” dalam <http://awsassets.wwf.or.id/downloads/flier_svlk___gftn.pdf>, diakses 14 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-85)
85. Ibid., [↑](#footnote-ref-86)
86. Ibid., [↑](#footnote-ref-87)
87. Flegt license.org, “ V-legal documents” dalam <http://www.flegtlicence.org/v-legal-documents>, diakses 21 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-88)
88. Joint Implementation Committee, “Indonesia dan UE sepakat memulai skema Lisensi FLEGT untuk produk kayu i pada 15 November 2015” dalam <http://www.euflegt.efi.int/web/jic-indonesia/bahasa-indonesia>, diakses 21 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-89)
89. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “ Press Release:Indonesia dan Uni Eropa luncurkan Skema Lisensi FLEGT untuk produk kayu legal” [↑](#footnote-ref-90)